



# MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

## INDONESIA MEMASUKI PEMILU PUTARAN I

**Otonomi dan Partisipasi:  
Jembatan Menuju Demokrasi?**  
Muhammad Asfar

**Masalah Kesenjangan Gender dan Format  
Perpolitikan Perempuan**  
Siti Aminah

**Kebijakan Publik Berperspektif Gender pada Era  
Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Timur**  
Sutinah, Eva Kusuma Sundari,  
Sokahandinah Kacabungkara dan Erma Susanti

**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  
Untuk Menyongsong Otonomi Pendidikan  
Sebuah Catatan Kritik**  
Tuti Budirahayu

**Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Perdagangan di Indonesia**  
Basuki Rekso Wibowo

**Sistem Bagi Hasil dan Fungsi Sosial Bank Syariah**  
Toto Warsoko Pikir

**Kerjasama dan Jaringan Informasi Perpustakaan**  
Endang Gunarti

Resensi Buku:  
**Konflik Antar Etnik di Pedesaan**  
Helmy Prasetyo Yuswinanto

## **MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK**

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

### **Pemimpin Umum**

Hotman M. Siahaan

### **Wakil Pemimpin Umum**

I. Basis Susilo

### **Penanggungjawab**

Kris Nugroho

### **Dewan Redaksi**

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas' oed (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

### **Pemimpin Redaksi**

Doddy S. Singgih

### **Sekretaris Redaksi**

Harijono

### **Redaksi Pelaksana**

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

### **Produksi dan Pemasaran**

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015; Fax: 031-5022492

e-mail: mkip@sby.centrin.net.id



## PENGANTAR REDAKSI

Pemilu Putaran I meski sudah usai, namun masih menyisakan sejumlah harapan dan kecemasan, akankah Pemilu Putaran II mampu menghasilkan sosok pemimpin yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani rakyat. Seperti diketahui bahwa hasil pemilu putaran I—setelah pengumuman hasil dari KPU—dua pasangan kandidat kuat capres dan cawapres yang selama ini cukup diperhitungkan yaitu: pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maju ke putaran II setelah mengalahkan tiga pasangan lain (Wiranto-Sholahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudokusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar). Banyak pengamat sosial-politik dengan sejumlah analisisnya memperhitungkan kans terbesar memang berada pada pasangan Mega-Hasyim dan SBY-Kalla. Walaupun selama masa kampanye kelima pasangan capres dan cawapres diwarnai dengan *black propaganda* yang berisi *track record*—baik yang baik maupun yang buruk—tetapi semuanya tetap berpulang pada pilihan rakyat sendiri, hal ini menunjukkan rakyat sudah mulai paham dan tidak mudah digoyahkan keyakinannya, meski tiap kontestan pasangan calon mengklaim mampu menyerap pendukung sampai sekian puluh bahkan ratusan ribu dalam kampanye, namun yang tidak disadari bahwa massa tersebut adalah massa yang bukan sesungguhnya.

Keberadaan jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi Nomor 3 (Juli) 2004 kali ini mencoba untuk membuka wacana dan wawasan dengan mengetengahkan topik Indonesia memasuki Pemilu Putaran I, telaah ini diperluas baik dari sisi politis, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Cukup banyak pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam edisi kali ini seperti tulisan yang dituangkan oleh Muhammad Asfar tentang Otonomi dan Partisipasi, Masalah Gender dan Format Politik Perempuan disajikan oleh Siti Aminah, secara khusus *scope* Jawa Timur permasalahan Gender dalam era Otonomi Daerah dijelaskan oleh Sutinah dan kawan-kawan, dari segi pendidikan sebuah ulasan kritis tentang MBS dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan disajikan Tuti Budirahayu, dua tulisan yang menyoroti segi ekonomi yaitu: dari Basuki Rekso Wibowo mengenai Arbitrase sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia serta Toto Warsoko Pikir mengulas Fungsi Sosial dan Bagi Hasil Bank Syariah, secara teknologi mengenai Jaringan Informasi Perpustakaan disampaikan oleh Endang Gunarti. Telaah/resensi buku kali ini mengangkat permasalahan Konflik antar Etnik di Pedesaan oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat yang sedang berkembang.

**Tim Redaksi**

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2004:  
**Indonesia Memasuki Pemilu Putaran II**

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

iii

### Daftar Isi

v

#### Otonomi dan Partisipasi: Jembatan Menuju Demokrasi?

Muhammad Asfar

1

#### Masalah Kesetaraan Gender dan Format Perpolitikan Perempuan

Siti Aminah

13

#### Kebijakan Publik Berperspektif Gender pada Era Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Timur

Sutinah, Eva Kusuma Sundari, Sokahandinah Kacasungkana  
dan Erma Susanti

27

#### Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk Menyongsong Otonomi Pendidikan

Tuti Budirahayu

47

#### Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia

Basuki Rekso Wibowo

61

#### Sistem Bagi Hasil dan Fungsi Sosial Bank Syariah

Toto Warsoko Pikir

77

**Kerjasama dan Jaringan Informasi Perpustakaan sebagai Antisipasi  
Kinerja Perpustakaan**

Endang Gunarti

89

**Konflik Antaretnik di Pedesaan**

Helmy Prasetyo Yuwinanto

103



## KERJASAMA DAN JARINGAN INFORMASI PERPUSTAKAAN SEBAGAI ANTISIPASI KINERJA PERPUSTAKAAN

**Endang Gunarti**

Dosen Program Studi Teknisi Perpustakaan FISIP Unair

### Abstract

*Educational process can't be separated from many learning source. One of them is Library. A poor condition of library in Indonesia and the lost of the library existence legality in Educational Institution need an alternative solution, to use sources more efficiently and effectively with the lower cost. The establishment of resource sharing and information network by some research show the effective, efficient and economical not only in financial aspect but also in documentation and technical library aspect.*

**Keywords:** *resource sharing, information network*

Sejak dekade 1980-an, globalisasi sudah merupakan kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat dunia. Sebagai suatu proses, globalisasi merupakan proses mendunia atau menjadi global, yang akan terus bergerak menembus batas-batas teritorial, ideologi, budaya, waktu dan jenis-jenis pengkotakan lain. Di Era Global ini, informasi berperan penting, karena ia bertindak sebagai penghubung antara sumber daya manusia, sumber dana, bahan baku, infra struktur politik, teknologi dan masih banyak lagi, sehingga semua unsur terlepas, tidak terikat oleh tempat dan waktu.

Keadaan-keadaan seperti yang tersebut di atas, yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi,

mendorong semakin cepatnya proses penciptaan dan pengkonsumsian informasi. Fenomena ini, oleh Wersig (Pendit, 1995:1) dinyatakan dalam tiga parameter, yaitu *depersonalisasi pengetahuan*, yang merujuk pada semakin kewalahannya manusia melawan kecenderungan untuk menempakan pengetahuan di luar kepalanya; *kredibilitas pengetahuan*, yang merujuk pada kondisi di mana manusia terpaksa harus percaya kepada pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung ditemukannya; dan *fragmentasi pengetahuan*, yang merujuk pada kenyataan, bahwa saat ini pengetahuan sudah sedemikian "halus" dan spesifik, sehingga sangat sulit mempertemukan dua ahli dari



dua bidang yang berbeda dalam suatu diskusi yang sama. Lebih jauh dikatakan bahwa, ketiga parameter ini dapat dijadikan indikator betapa masyarakat manusia sedang menghadapi persoalan dengan besarnya jumlah informasi dan pengetahuan yang beredar di sekelilingnya.

Banjir informasi, dan faktor ketidakmampuan manusia untuk menyaringnya, menyebabkan tingginya biaya informasi. Informasi yang berkualitas tinggi, cepat, tepat dan akurat merupakan tuntutan di era yang penuh kompetisi sekarang ini. Situasi ini menimbulkan perbedaan kebutuhan informasi, yang oleh Sylvia P. Webb (1996: 7) dibedakan antara *Information needs*, *Information wants*, *Information demands*, dan *Information use*. *Information Needs*, merupakan informasi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan atau untuk mengembangkan hobi juga kesenangannya. *Information Wants*, adalah informasi yang ingin dimiliki oleh seseorang. Sedang *Information Demands* adalah sebuah permintaan akan informasi yang diyakini dibutuhkan atau diinginkan. Kedua jenis informasi inilah yang sering mendorong seseorang untuk berhadapan dengan petugas informasi, berinteraksi dengan sistem informasi dan sumber-sumber informasi yang ada. Jenis yang terakhir adalah *Information Use*, yaitu informasi yang benar-benar digunakan oleh seseorang.

Adanya ledakan informasi, semakin tingginya harga informasi, keinginan pemakai sumber-sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang tepat, cepat dan akurat, keinginan perpustakaan atau lembaga informasi yang lain untuk memberikan layanan prima kepada para pemakainya, serta adanya kesadaran

bahwa tiada satu perpustakaanpun yang sanggup berdiri sendiri telah mendorong perpustakaan/lembaga pengelola informasi untuk menjalin suatu kerjasama.

### Kondisi Perpustakaan Indonesia

Perpustakaan pada dasarnya telah diselenggarakan sejak dahulu, tetapi baru mulai ditangani lebih serius dalam tahun ajaran 1974/1975, ketika Lembaga Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan — yang kemudian menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan, mulai melakukan pendataan tentang jenis-jenis perpustakaan untuk memperoleh masukan guna pembinaan dan pengembangan. Diperoleh temuan, bahwa secara umum kondisi perpustakaan, mulai dari gedung, sumber daya manusia (SDM), koleksi, alat perlengkapan lain juga sistemnya sangat rendah dan memprihatinkan, sehingga perlu penanganan segera.

Jika pada tahun 1974/1975 telah di data bahwa kondisi perpustakaan di Indonesia memprihatinkan, maka setelah 27 tahun berlalu, kondisi perpustakaan tidak jauh berubah. Menurut data Kompas Cybermedia, rabu 15 mei 2002, disebutkan, bahwa idealnya setiap sekolah memiliki perpustakaan. Kenyataannya, berdasarkan data statistik, jumlah sekolah (dari SD sampai SMA) di seluruh Indonesia ada 220.695 buah sekolah (data Balitbang Diknas 1998-2000). Sedangkan jumlah perpustakaan sekolah, yang tercatat pada pangkalan data Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), yang dimuat dalam Berita dan Peristiwa, Jum'at 9 agustus 2002 oleh Perpustakaan Nasional RI, hanya 12.000 buah. Lebih jauh dijelaskan, bahwa, untuk tingkat SD, baru 5% yang memiliki



perpustakaan sekolah, SMP hanya 42% dan SMU baru 68%. Keadaan yang lebih baik dialami oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi. Hampir semua institusi pendidikan tinggi pasti memiliki perpustakaan, hal ini dimungkinkan karena salah satu prasyarat pendirian suatu lembaga pendidikan tinggi, adalah adanya perpustakaan. Walaupun kondisi perpustakaan di dalam insitusi pendidikan tinggi tidak sama antara satu dengan yang lain, ada yang sangat bagus, tetapi ada pula yang sangat memprihatinkan.

Lebih jauh, Kompas Cyber Media, menyebutkan bahwa sekitar 76,7% atau 19.220 SD dan MI di Jawa Tengah belum memiliki perpustakaan. Minimnya dana operasional perpustakaan sekolah menyebabkan minat baca siswa tidak tersalurkan, sementara kondisi perpustakaan umum yang seharusnya menjadi alternatif untuk mencari bahan bacaan tidak lebih baik kondisinya. Data dari Diknas Jateng 1999/2000 menyebutkan, hanya 14% SD/MI yang telah memiliki ruang/gedung perpustakaan dan perpustakaan dikelola oleh 61.324 tenaga guru yang diperbantukan.

#### **Peran Perpustakaan Untuk Akademik**

Seperti yang telah diuraikan terdahulu fungsi perpustakaan sangatlah luas, dari pusat kegiatan belajar, penelitian sampai dengan tempat rekreasi. Terlihatlah di sini, bahwa sebenarnya harapan yang ditumpukan pada perpustakaan sebagai suatu institusi, sangatlah besar. Hal ini bisa dimengerti, karena perpustakaan di posisikan sebagai jantung dari lembaga pendidikan. Berkaitan dengan perpustakaan dalam pencapaian prestasi akademik,

patutlah kita menyimak penelitian Keith Curry Lance dan kawan-kawan dari *Library Research Service* tentang peran perpustakaan sekolah dalam pencapaian prestasi akademik. Lance dan kawan-kawan melakukan penelitian di Colorado Amerika Serikat, dengan mengambil sampel dari berbagai peringkat sekolah, baik dari kota, pinggiran kota, maupun daerah pedesaan, sehingga cukup representatif mewakili keragaman sekolah di Amerika Serikat.

Berbagai data dihimpun, baik itu tentang keadaan sosio ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mendukung perpustakaanya, jumlah guru pustakawan yang ada, jumlah koleksi, keaktifan guru pustakawan dalam melakukan bimbingan terhadap siswa, yang semuanya dibandingkan dengan *IOWA test for basic skill* dan *test of achievements*. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi yang signifikan (bermakna) antara :

- siswa pada sekolah dengan dana perpustakaan yang tinggi, cenderung mencapai nilai yang lebih tinggi — terlepas dari tingkat sosio ekonomi orang tua
- karakteristik perpustakaan dengan jumlah pustakawan dan koleksi lebih besar mendukung baiknya pencapaian nilai siswa
- sekolah, dengan guru pustakawan yang aktif melakukan bimbingan pada siswa juga secara nyata mempengaruhi pencapaian nilai siswa.

Penelitian Colorado ini, merupakan penelitian pertama yang menilai dampak perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini, tidak saja sangat menunjang keberadaan



perpustakaan di sekolah tetapi sekaligus memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memperhitungkan berbagai faktor sosial yang beresiko. Hasil penelitian Lance ini, patut menjadi dorongan bagi kita semua, untuk terus memperjuangkan keberadaan perpustakaan sekolah. Karena sekolah bukan hanya jenjang pendidikan formal untuk mendapatkan pengesahan ijazah saja, melainkan merupakan suatu proses pembelajaran yang panjang dan efektif, sebagai suatu proses pendewasaan dengan segala perubahannya, tidak hanya perubahan dari segi fisiknya saja. Penelitian Lance ini, seharusnya menjadikan masukan terhadap UURI No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dikatakan bahwa, paradigma pendidikan lama cenderung bersifat konservatif dan sentralistik, dan sering hanya menghasilkan berbagai bias, bahkan kontraproduktif bagi peningkatan mutu pendidikan. Paradigma pendidikan lama ini, dianggap sudah tidak relevan lagi di era reformasi dan otonomi, sehingga perlu suatu paradigma baru, yang lebih bersifat desentralisasi, berorientasi pada peserta didik, sekaligus bisa mengakomodasikan berbagai prakarsa, partisipasi, dan aspirasi juga kontrol masyarakat. Lebih jauh lagi dimaksudkan, bahwa adanya UU Sisdiknas ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi kemandirian sekolah dalam memajukan lembaganya, juga membangkitkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan. UU No.20 Tahun 2003 ini dalam implementasinya sangat terkait dengan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dikatakan bahwa dalam proses belajar-mengajar

subyek bukanlah guru, tetapi peserta didik. Sedang guru hanya merupakan salah satu sumber belajar dan bukan satu-satunya yang aktif. Aktifitas adalah pada peserta didik sendiri, yang paling menentukan berhasil tidaknya kegiatan belajar itu. Selain itu juga diberlakukannya Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, mutu dan relevansi pendidikan di sekolah. Juga MBS memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di rumah.

Terkait dengan fungsi sekolah yang dijabarkan dalam Sisdiknas 2003, telah menjadi kewajiban bagi sekolah/institusi pendidikan untuk menyiapkan program, fasilitas, laboratorium, bengkel dan berbagai sumber-sumber belajar. Akan tetapi, dari berbagai pasal dalam UU Sisdiknas yang baru, tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa sarana-sarana tersebut harus diadakan oleh sekolah, termasuk di antaranya perpustakaan. Keadaan ini sangatlah riskan, karena pada pasal 35 Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang "Sistem Pendidikan Nasional" ditegaskan bahwa, "Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar". Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan antara lain:

"Pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan maupun peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Salah satu



sumber belajar yang amat penting tetapi bukan satu satunya adalah perpustakaan, yang harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan"

Dari isi UU No 2 1989 tersebut, jelaslah sudah sikap dan kebijakan pemerintah dibidang perpustakaan sekolah. Dengan undang-undang ini, Pemerintah, pertama, telah memberikan dasar hukum (legalisasi) terhadap usaha pendirian perpustakaan sekolah, dan yang kedua menjamin kelangsungan kehadiran perpustakaan sekolah dalam pendidikan nasional. Jadi berdasarkan undang-undang itu keberadaan perpustakaan pada setiap jalur pendidikan, merupakan suatu keharusan (*compulsory*), walaupun masih sebagai elemen pendukung. Sedang pengelolaannya menjadi tanggungjawab setiap penyelenggara sekolah, baik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan arahan fungsi tersebut, berarti berbagai koleksi dan layanan yang diberikan oleh perpustakaan sekolah, tidak berpusat pada pelajaran saja, tetapi juga pada pengembangan minat dan bakat siswa.

Ketika dalam UU No 2 Tahun 1989 jelas-jelas perpustakaan mendapatkan kedudukan yang pasti saja, nasib perpustakaan masih sangat memprihatinkan, bagaimana nasibnya kemudian ketika UU No 20 Tahun 2003, tidak memuat bagaimana kedudukan perpustakaan? Apakah akan lebih menyedihkan? Bagaimana bisa membangkitkan peran aktif siswa dengan KBK

dan MBS nya jika sarana dan prasarana pendukungnya tidak tersedia? Yang masih membuat kita bernapas lega adalah masih adanya upaya pembentukan SD inti (untuk sekolah dasar), sistem akreditasi sekolah/ perguruan tinggi dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, adanya kemajuan Teknologi Informasi, telah memberikan secercah titik terang. Setidaknya banyak hal yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, yang semuanya itu bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

#### **Kerjasama dan Resource Sharing**

Kondisi perpustakaan yang masih memprihatinkan di Indonesia, dan hilangnya legalisasi keberadaan perpustakaan di suatu institusi pendidikan, mau tidak mau membutuhkan suatu alternatif bagaimana mendayagunakan sumber-sumber yang telah ada menjadi lebih efektif dan dengan biaya yang lebih sedikit. Alternatif itu adalah kemauan untuk membentuk kerjasama antar perpustakaan, baik berbasis teknologi informasi maupun secara konvensional. Pengertian kerjasama antar perpustakaan menurut Sulistyio-Basuki (1991: 54) adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Lebih jauh dikatakan, bahwa tidak ada satu perpustakaanpun yang dapat berdiri sendiri, dalam arti koleksinya mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Perpustakaan sebesar *Library of Congress* dengan koleksi sebesar 65.000.000 pun masih mengandalkan kerjasama antar perpustakaan. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong kerjasama antar



perpustakaan ialah :

- Pendidikan
- Kemajuan dalam bidang teknologi
- Berkembangnya kesempatan dan peluang bagi kerjasama internasional diberbagai bidang
- Berkembangnya teknologi informasi, terutama telekomunikasi dan komputer
- Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi yang sama
- Kerjasama memungkinkan penghematan fasilitas, biaya, tenaga dan waktu

Adapun bentuk kerjasama antar perpustakaan yang dikenal adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama Pengadaan
2. Kerjasama pengolahan
3. Kerjasama Penyediaan Fasilitas
4. Kerjasama Peminjaman Antar Perpustakaan
5. Kerjasama Antar Pustakawan
6. Kerjasama Penyusunan Katalog Induk
7. Kerjasama Silang Layan (Pemberian Jasa Informasi)

Sewel (1981) menyatakan bahwa adanya ledakan informasi, yang didukung oleh adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, semakin tingginya biaya mendapatkan sumber-sumber informasi, serta semakin lebarnya kesenjangan antara sumber-sumber yang ada dengan para pemakainya, baik yang disebabkan oleh lokasi geografis atau posisi sosial individu, merupakan faktor-faktor pendorong terbentuknya konsep *library resource sharing*. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa alasan pokok yang mendorong perpustakaan untuk melakukan resource sharing dengan perpustakaan yang lain dengan pusat-pusat dokumentasi atau dengan organisasi-organisasi sejenis, adalah membantu mereka untuk

memuaskan kebutuhan *end user* (pemakainya) akan dokumen dalam berbagai bentuk maupun kebutuhan mereka akan informasi.

Istilah *resource sharing* kelihatannya hampir sama dengan istilah kerjasama perpustakaan yang telah kita kenal yaitu, istilah kerjasama perpustakaan (*library co-operation*). Pendapat ini dapat dibenarkan, karena banyaknya kegiatan yang sama, walaupun begitu keduanya didasari oleh pendekatan yang berbeda. Magrill (1978), menyatakan bahwa

*resource sharing means not only giving and receiving a part, but taking part in the process, sharing both the objects involved and work of distribution.*

Berkaitan dengan uraian di atas, maka pada istilah terdahulu – kerjasama perpustakaan (*library co-operation*) – lebih melihat perpustakaan seperti apa adanya, dan menggambarkan bagaimana mereka akan lebih dapat meningkatkan sasarannya jika mereka bekerja sama. Sedangkan pada *library resource sharing* melihat secara keseluruhan baik secara fisik, intelektual dan sumber-sumber secara konseptual pada satu sisi dan keseluruhan individu dengan perpustakaan juga kebutuhan informasi di sisi yang lain dan meliputi seluruh aktivitas dengan mengorganisasikannya menjadi sebuah keterpaduan yang dapat mempertemukan kebutuhan satu dengan yang lain.

Lebih jauh Sewel (1981) mengatakan bahwa konsep resource sharing dapat dilihat sebagai perubahan dari layanan yang berorientasi pada materi ke layanan yang berorientasi pada pemakai.



Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *resource sharing*. Kanthambi (1982) melakukan penelitian di perpustakaan Politeknik-Universitas Malawi tentang kontribusi perpustakaan dalam pemanfaatan sumberdaya secara bersama dalam rangka pemanfaatan informasi di bidang industri, perdagangan dan informasi teknologi. Dalam penelitian ini banyak dibahas tentang bagaimana *resource sharing* yang terjadi antara perpustakaan dengan kantor-kantor pemerintah, perusahaan-perusahaan, industri-industri, termasuk di dalamnya pemakai, staf, akomodasi dan perlengkapan. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk pengembangan perpustakaan dimasa yang akan datang direkomendasikan agar perpustakaan perlu dan dapat terus meningkatkan kegiatan *resource sharing*.

Demikian pula Lim (1982) tentang prospek perkembangan *resource sharing* dalam proses temu-balik informasi dan penggunaan MARC di Malaysia. Disebutkan bahwa *resource sharing* berkembang sangat pesat di Malaysia. Perkembangan ini tidak terlepas dari dipergunakannya MALMARC (*Malaysian Marc*), yang mendorong dikembangkannya dan disusunnya Katalog Induk (*union catalogue*), daftar tambahan, yang memberikan kemudahan dalam tukar menukar cantuman dan informasi dengan negara lain dari materi lokal, sehingga memungkinkan untuk katalog terpasang (*on-line catalogue*) dan membentuk *Malaysian National Bibliography*. Perkembangan yang lain adalah dibangunnya PURPUNET yang merupakan data base artikel majalah dari 5 universitas dan Perpustakaan Nasional Malaysia.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa upaya untuk mengadakan *resource sharing* bagi perpustakaan untuk meningkatkan layanan pada para pemakainya sangat penting. Selain itu, adanya keseragaman titik sarak berupa keseragaman penggunaan istilah, nomor cantuman dan konsistensi penggunaan istilah dengan berpedoman pada suatu standar kode tertentu sangat mendorong jalannya *resource sharing* yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penggunaan INDOMARC (*Indonesian Marc*) perlu lebih dikembangkan, jika menginginkan konsep *resource sharing* berkembang di Indonesia.

#### Pengertian Jaringan Informasi

Muller (Martowardoyo, 1995:148-165) mengemukakan pendapat yang agak klasik tentang jaringan informasi, yaitu usaha kerjasama yang dilakukan oleh perpustakaan dan pusat informasi, yang bergabung bersama, karena memiliki koleksi dengan subjek yang sama atau berada dalam wilayah yang sama, untuk memanfaatkan dan atau mendayagunakan sumber informasi secara bersama-sama. Termasuk di dalamnya memanfaatkan keahlian, peralatan, teknologi serta hal-hal lain yang mereka miliki secara bersama untuk memberikan pelayanan informasi yang efektif. Sedang Smith (1980) menyatakan bahwa jaringan informasi adalah merupakan komunikasi (hubungan timbal balik) antara unit dan pusat pengolahan informasi dengan cara saling tukar dokumen, pemakaian dan pengolahan secara bersama. Proses komunikasi tersebut berbasis pada alat bantu komputer beserta peralatan



pendukungnya.

Istilah *Information Network* adalah kerjasama informasi baik yang bersifat formal ataupun informal antara unit informasi dalam rangka tukar menukar informasi (Katz, 1980). Lebih jauh dikatakan bahwa sumber informasi yang tidak terbatas pada data literal atau bibliografis, tapi dapat berupa informasi yang terdapat dalam berbagai kemasan informasi seperti CD-ROM, bentuk mikro, audio-visual dan sebagainya, yang dilakukan secara manual maupun melalui akses terpasang (*on-line*). Jaringan informasi yang sering disebut pula sebagai jaringan kerja informasi (*Information network*) adalah suatu sistem terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi seperti perpustakaan, pusat dokumentasi, pusat analisis informasi, dan pusat informasi yang tujuannya menyediakan pemasukan data yang relevan tanpa memperhatikan bentuk maupun asal data untuk keperluan masyarakat pemakai (Sulistyo-Basuki, 1991:136).

Lebih lanjut Rayward (Woodsworth, 1991), mendefinisikan jaringan sebagai :

*"a system of library relationships, ordered or structured according to variety of forms agreement, through which sustained communication can take place and by means of which bibliographic and other information, documentary materials, and expertise, of kind and to degree upon, are transmitted"*

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Martin (1986), bahwa jaringan adalah :

*"group of individuals or organizations that are interconnected to form a system to accomplish some specific goals. This linkage must include a communications mechanism, and any networks exist for express purpose of facilitating certain types of communication among members"*

Menurut Hartono (1994), ada 3 (tiga) persyaratan umum untuk mendirikan jaringan informasi, yaitu :

1. Perpustakaan yang bekerjasama memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain
2. Masing-masing perpustakaan yang bekerjasama memiliki kemauan untuk membagi (meminjamkan) koleksi yang dimilikinya kepada perpustakaan lain
3. Perpustakaan yang bekerjasama memiliki kesepakatan tentang bentuk jaringan dan mekanisme dalam pelaksanaan kerjasama

#### Tujuan Jaringan Informasi

Tujuan jaringan informasi secara umum adalah meningkatkan layanan kepada pemakai dengan jalan mendayagunakan koleksi yang dimilikinya secara bersama-sama. Untuk dapat mencapai tujuan jaringan informasi diperlukan koordinasi yang kuat, efektif, efisien dan ekonomis, tidak hanya dari segi biaya, tetapi juga dari segi teknis perpustakaan dan dokumentasi (Soedoyo, 1984:5).

Pendapat lain yaitu Shera (1976:177-182) menguraikan tujuan jaringan informasi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan referensi dan informasi. Pelayanan ini tidak hanya diberikan oleh pusat jaringan, akan tetapi juga oleh anggota jaringan



2. Mendayagunakan secara maksimal sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan, pusat jaringan maupun sistem jaringan informasi. Pelayanan informasi tidak terbatas pada koleksinya sendiri, akan tetapi juga ditunjang oleh seluruh sistem jaringan
3. Meningkatkan kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Kerjasama internasional terutama dilakukan oleh pusat jaringan
4. Sebagai perantara pertukaran informasi. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pusat jaringan. Untuk mendapatkan informasi biasanya yang dihubungi pertama adalah pusat jaringan.

Perancangan sistem informasi (baik itu berbentuk perpustakaan, unit dokumentasi, unit kearsipan dll) yang bijaksana, semestinya menyadari bahwa pemakai informasi merupakan komponen yang aktif dan mobilitas sosial pemakai informasi akan sangat menentukan arah dari rancangan sistem informasi. Rancangan sistem informasi yang berhasil guna adalah rancangan sistem informasi yang berorientasi pada pengguna (*user oriented*). Hal ini dikarenakan, tujuan akhir dari suatu sistem informasi adalah memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada pemakai, yakni melalui pemenuhan kebutuhan informasi mereka.

Menurut Suyanto (1993), hubungan antara pemakai informasi dengan sistem informasi merupakan hubungan dinamis. Ini berarti sistem informasi harus selalu dimodifikasi sesuai dengan profil minat pemakai, guna melayani kebutuhan informasi para pemakai, dan pemakai diharapkan akan lebih terampil dalam mengenali kebutuhan mereka akan informasi.

### Manfaat Jaringan Informasi

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, pengguna teknologi informasi sudah merasuk ke semua sektor, termasuk perpustakaan. Penerapan teknologi informasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan pekerjaan rutin perpustakaan (*library house-keeping*)
2. Yang berhubungan dengan penelusuran dan penemuan kembali informasi (*information retrieval*)

Rowley (1992:4-5) mengemukakan sistem berbasis teknologi informasi diper-pustakaan menawarkan berbagai hal, antara lain untuk menampung beban kerja yang semakin meningkat, untuk mencapai efisiensi yang lebih besar, memperkenalkan layanan baru, serta bermanfaat untuk kerjasama dan sentralisasi perpustakaan. Selain itu Ted (1993:6) menyatakan bahwa ada dua alasan mengembangkan sistem berbasis komputer di perpustakaan, yaitu untuk menyediakan layanan dengan biaya lebih sedikit, memberi manfaat tambahan lain dengan biaya yang lebih kecil. Dari kedua pendapat di atas jelaslah bahwa, penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi di perpustakaan memberikan manfaat yang sangat besar, selain meringankan beban kerja, juga memberikan efisiensi yang lebih, baik itu dari segi waktu juga dari segi biaya, serta dapat meningkatkan layanan penelusuran informasi, tidak saja pada pangkalan data mereka sendiri, tapi juga bisa menjangkau pangkalan data yang berada ribuan kilometer dari kita. Yang semuanya itu akan meningkatkan kepuasan pemakai perpustakaan.



Kalau tadi tentang manfaat penggunaan teknologi informasi secara umum, berikut ini akan membahas tentang manfaat pembentukan jaringan informasi untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak atau keuntungan yang dapat diraih. Adapun manfaat dari sistem jaringan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan secara bersama-sama dengan menghimpun informasi dari anggota jaringan agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, sehingga terbentuk suatu kekuatan yang lebih besar dibandingkan tanpa jaringan informasi
2. Pengolahan dokumen secara bersama dengan memanfaatkan pangkalan data, indeks, abstrak dan data bibliografi yang dimiliki dan atau diterbitkan jaringan
3. Pelayanan informasi dan penyebaran informasi pada masyarakat luas, dapat dilakukan secara bersama-sama antar anggota jaringan. Pelayanan informasi menjadi lebih baik, karena jumlah koleksi yang dapat diakses oleh pemakai menjadi lebih banyak, berupa data gabungan anggota jaringan. Dengan demikian, akan terbentuk kekuatan dan efektivitas kelompok anggota jaringan yang lebih besar. Hubungan antara kekuatan bersama kelompok dan kekuatan perpustakaan sendiri-sendiri dapat diungkapkan sebagai :

$$K (P1+ P2+ P3+ ...) >$$

$$KP1 + KP2 + KP3 + ...$$

Dengan ketentuan bahwa K adalah kekuatan dan efektifitas, dan P1, P2, P3,... adalah masing-masing perpustakaan. "Rumus" di atas juga dapat digunakan untuk membenarkan kerjasama perpustakaan ataupun tidak

membenarkan. Jadi bila kekuatan dan efektifitas masing-masing kelompok perpustakaan lebih besar daripada kekuatan dan efektifitas masing-masing perpustakaan dijadikan satu, maka kerjasama perpustakaan dapat diteruskan. Bila kekuatan dan efektifitas kolektif perpustakaan sama dengan kekuatan dan efektifitas perpustakaan masing-masing dijadikan satu, maka kerjasama perpustakaan perlu ditinjau kembali (Sulistyo-Basuki, 1993:2).

Adanya jaringan informasi ini, telah membentuk suatu data bibliografi yang sangat besar. Glasco (1985) dalam Woodsworth menemukan, bahwa sejak OCLC's memperkenalkan subsistem pinjam antar perpustakaan, tidak saja berpengaruh terhadap perubahan ke dalam organisasi perpustakaan itu sendiri, tetapi juga terjadi peningkatan peminjaman yang sangat tinggi, baik itu dari peneliti-peneliti pada perpustakaan yang lebih kecil, tetapi juga dari berbagai perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Penelitian Potter's (1986) juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana terbentuknya jaringan perpustakaan, menyebabkan meningkatnya peminjaman yang sangat tajam pada perpustakaan yang lebih besar. Berkaitan dengan pengiriman dokumen, Miller dan Tegler (1988) membandingkan mana yang lebih efektif, antara pengiriman dokumen dengan menggunakan cara tradisional menggunakan jasa kurir dengan penggunaan jaringan informasi perpustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa, sistem kurir membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dan lebih banyak membutuhkan waktu, dibandingkan dengan penggunaan jaringan.

Pembentukan jaringan, juga memberikan manfaat semakin kecilnya



tumpang tindih koleksi, antar perpustakaan anggota jaringan. Penelitian Potter's (1986), Shaw and David (1979) menunjukkan bahwa, terlibatnya perpustakaan dalam suatu jaringan dapat memperkecil tumpang tindih pemilikan koleksi, dan dapat lebih mengantisipasinya. Semua itu menguntungkan perpustakaan yang terlibat dalam jaringan.

### **Pertimbangan Perancangan Jaringan**

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan perpustakaan. Sebagai penyedia layanan jasa informasi, secara berangsur-angsur perpustakaan telah menerima dan melibatkan diri dalam penggunaan teknologi informasi. Tedd (1993:3) mengemukakan bahwa, sejak awal tahun 1960-an beberapa perpustakaan di Amerika Utara dan Inggris telah mulai bereksperimen dengan komputer. Duval (1992:249) mengatakan awalnya, penggunaan komputer dengan perangkat lunaknya digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perpustakaan, yang disebut automasi perpustakaan. Dengan demikian, automasi perpustakaan adalah pemanfaatan komputer untuk membantu melaksanakan berbagai kegiatan perpustakaan seperti, kegiatan pengatalogan (*cataloguing*), sirkulasi (*circulation*), akuisisi (*acquisition*), dan pengawasan serial (*serials control*) (Bustan, 1993:1).

Dalam merancang suatu sistem jaringan informasi, perancang akan berharap agar jaringan dapat berjalan dan bekerja dengan baik. Kendala yang dihadapi Indonesia, seperti negara berkembang lain, adalah terlalu menekankan pembahasan mengenai

perancangan sistem dalam jaringan, dengan menggunakan teknologi informasi yang disebut komputer. Sebenarnya, perancangan suatu sistem yang benar sangat membantu berjalannya jaringan, terutama dalam usaha pengembangan jaringan selanjutnya. Steven (1980:29-49) mengungkapkan 14 faktor yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem, yaitu :

1. Sifat saling ketergantungan
2. Pangkalan data bibliografi
3. Standar kualitas
4. Sistem terpasang
5. Keputusan bersama
6. Komunikasi
7. Akses kepada semua anggota
8. Integrasi dan koordinasi
9. Satu jaringan untuk semua
10. Sentralisasi
11. Pengembangan dari bawah
12. Penanggung jawab
13. Kerjasama internasional
14. Biaya produktivitas

Keinginan bergabung dalam suatu jaringan, biasanya dipengaruhi oleh kemampuan jaringan itu dalam menekan biaya dan menaikkan kemampuan produktivitas (layanan, penyebaran informasi dan lain-lain). Dalam membangun suatu sistem jaringan, dibutuhkan suatu perencanaan yang sangat teliti, agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada tahap perencanaan ini, menurut McLeod (1995) setidaknya melalui 5 tahapan penting, yaitu :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap analisis
3. Tahap rancangan
4. Tahap penerapan
5. Tahap penggunaan

Dalam setiap tahapan itu, terdapat berbagai langkah yang harus ditempuh,



sehingga dapat diketahui, apakah sistem tersebut telah berjalan dengan baik, ataukah memerlukan perubahan sedikit atau mendasar. Dari kelima tahapan penting di atas, dapat ditambahkan satu tahapan lagi yaitu tahap evaluasi. Tahap ini diperlukan sebagai umpan balik terhadap sistem yang telah dipilih dan digunakan tersebut.

Sering kali suatu lembaga pengelola informasi, suatu negara atau daerah tidak memiliki sumber dana dan sumber daya yang cukup. Adanya keterbatasan sumber daya ini, Figueiredo (1992) memberikan usulan pemakaian informasi dalam suatu sistem informasi yang terpadu. Ia mengatakan bahwa tujuan dan sasaran untuk memberikan layanan informasi yang lebih baik relatif akan dapat terwujud. Penelitian Figueiredo mengambil tempat di Pusat Kesehatan Brasil tahun 1976 dan di *Brazilian Company for Agronomical Research* menunjukkan bahwa pemakaian sistem informasi merupakan alat pembantu manajemen untuk mencapai hasil yang diharapkan.

#### **Hambatan Jaringan Informasi**

Dalam melaksanakan kegiatan dalam suatu jaringan informasi, pastilah terdapat hambatan, di mana hambatan-hambatan tersebut mungkin akan bersifat kasuistik, berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan setiap daerah atau lingkungan tertentu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Demikian pula faktor-faktor yang mempengaruhinya. Chifwepa (1993:78) mengemukakan hambatan-hambatan yang ditemui dalam sistem jaringan informasi pertanian di Zambia. Adapun hambatan-hambatan itu adalah :

1. *Inadequate personnel and human resources*
2. *Lack of clear policy or legislation*
3. *Conflicts among institutional missions, goals, and objectives*
4. *Lack of tools for cooperation*
5. *Lack of reprographic facilities*
6. Long distance between libraries, compounded by poor communication

Terkait dengan berbagai hambatan yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya dibuat suatu penelitian tersendiri untuk kasus-kasus kerjasama perpustakaan di Indonesia. Hal ini penting karena banyak kerjasama antar perpustakaan yang sudah terbentuk tapi sekarang tinggal nama, tapi ada pula kerjasama yang bertahan lama. Selain dari berbagai hambatan yang telah dikemukakan di atas, dari pengamatan penulis selama ini bisa ditambahkan, adanya sifat egoistik dari para pustakawan sendiri serta adanya sifat egosentrik dari perpustakaan yang sering membuat kerjasama yang dengan susah payah dibentuk dan telah menghabiskan dana banyak akhirnya tinggal nama.

#### **Penutup**

Kelangsungan proses pendidikan tidak bisa terlepas dari berbagai sumber-sumber belajar, termasuk di antaranya perpustakaan. Perpustakaan sangat diperlukan untuk mempertinggi kemampuan dan daya serap peserta didik, juga meluaskan cakrawala siswa maupun pengajar. Sering dikatakan perpustakaan adalah jantung pendidikan. Akan tetapi jika dilihat kondisinya jantung itu sangat lemah karena tidak dijaga keschatannya. Sering kita pesimis dengan perlambang itu, bahkan dalam sebuah diskusi baru-baru ini, terlontar suatu ungkapan:



"...kita tidak usah terlalu muluk menganggap perpustakaan adalah jantung pendidikan, tapi dalam kenyataannya tidak ada. Lebih baik jadi wc institusi pendidikan, jadi walaupun jelek tapi perpustakaan itu pasti ada dan dicari. Bahkan kalau jelek, bau apalagi jika mampet tentunya yang terkena adalah pemakai itu sendiri, dan mereka tentunya buru-buru menyelesaikan kasus itu..."

Harapan untuk mengoptimalkan dan memperbaiki kinerja dan fungsi perpustakaan, dengan mempertimbangkan kondisi perpustakaan pada umumnya, adalah meningkatkan kerjasama antar perpustakaan dan lebih jauh membuat suatu jaringan informasi antar perpustakaan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, semoga

dengan adanya otonomi daerah, memberikan angin segar sekiranya ada perhatian pemerintah daerah, untuk memperhatikan perkembangan perpustakaan baik perpustakaan sekolah, perguruan tinggi maupun perpustakaan umum, dari tingkat desa sampai propinsi. Karena bagaimanapun, setiap warga-negara mempunyai hak untuk mengakses informasi secara bebas dan mendapat pendidikan. Dan perpustakaan adalah sarana untuk mendapatkan itu semua.

Memang untuk memulainya diperlukan suatu komitmen, kerja keras juga dana yang tidak sedikit. Tetapi bagaimanapun, hal ini harus segera dimulai. AFTA yang telah dimulai tahun lalu, selain sebagai ancaman, juga bisa dijadikan sebagai pendorong. Adanya otonomi daerah, bisa dijadikan dorongan, karena semua itu, bermuara dan pada upaya mencerdaskan bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chifwepa, Vitalicy, "Agricultural Library Cooperation in Zambia". Information Development" Vol 9. No. 1/2, Marc/June 1993:78-81
- Creth, Sheila D, "The Electronic Library : slouching toward the future or creating a new information environment". <http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/follet/creth/paper.html>
- Pendit, Putu Laxman, "Relevansi subyektif dan orientasi kepada pemakai dalam layanan perpustakaan untuk masyarakat peneliti". Makalah pada seminar "Peran perpustakaan dalam menuju masyarakat peneliti". 26 April 1995, di UPT Perpustakaan UI, Depok
- Webb, Sylvia P, "Creating an information service" (London: Aslib, 1985)
- Sewell, Philip.H, "Resource Sharing : co-operation and co-ordination in library and information services"(London: Andre Deutch Limited, 1981).
- Magrill, Rose Mary, "The Concept of Resource Sharing". Canadian Lib. Journal. 30 (5) Oct, 1978 : 355-359
- McLeod, Raymond Jr, "Sistem Informasi manajemen" (Jakarta: Prenhallindo, 1996)
- Kanthambi, P., "Contributions of the University of Malawi – The Polytechnic Library – in the resource sharing of business and technical information in the



- city of Blantyre*". *MALA Bulletin*, 3(1)July, 1982:26-32
- Kartosedono, Soekarman, "Peranan Perpustakaan Anak-anak/Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Majalah IPI*, 17 (2), 1995
- Lim, Chee Hong, "Resource sharing in information retrieval and MARC in Malalaysia : recent development and prospect. *Majalah Perpustakaan Malaysia*, 10,1982 : 16-20.
- Shera, Jesse R, "*Intoduction of Library science*" (Colorado : Libraries Unlimited, 1976)
- Soedoyo, Soetitah, "Kerjasama antar perpustakaan khusus dalam pelayanan kesiagaan informasi mutakhir". *Majalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Tahun I, 1, 1988:27-35.
- Sulistyo-Basuki, "*Jaringan Informasi di Indonesaia khususnya jaringan informasi pengkajian Islam : Antara tuntutan dan harapan*". makalah pada Lokakarya Sistem Jaringan Informasi Pengkajian Islam. Jakarta, 4-5 desember, 1993
- Rowley, Jennifer E, "Revolution in current awareness services". *Journal of Librarianship and Information Science*, 26(1) March, 1994:7-14
- Tedd, L.A., "*Computer based library system : a review of the last twenty-one years*". *Journal of Documentation*, No.43, 1987:145-165
- Figueiredo, Nice, "*Information as a tool for development*". *Information & Library Rev.*, 24:189-201
- Glasco, I.T.M., "The impact of the OCLC interlibrary subsystem on ARL Libraries. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburgh P.A. dalam Library cooperation and Network, anne Woodsworth, 1991
- Martawardoyo, Sutrisno, "Sistem jaringan informasi nasional". *Majalah Ikatan Pustakawan Indonesia*, vol. 1-2, 1985
- Miller, C. And Tegler, P., "An analysis of interlibrary loan and commercial document suply performance". *Library Quaterly*, 58,1988:352-366
- Woodsworth, Anne, "Library Cooperation and networks: a basic reader" (New York: Neal-Schuman Pub., 1991)
- Bustan Fransiskus, "*The impact of automation on the organization of university library and it's implications for Indonesian University Library*", Dissertation, University of wales, Aberystwyth, 1993.
- Steven, Norman, "A historical perspective on the concept of networks : some preeliminary consideration", dalam Anne Woodsworth: neal-Schuman publ., 1990
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com), "19000 sekolah dasar tak punya perpustakaan", Rabu 15 Mei 2002
- [www.jakarta@bpkpenabur.or.id](mailto:www.jakarta@bpkpenabur.or.id), "Perpustakaan sekolah menaikkan pringkat siswa"